

PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN PEDAPATAN DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA

Lestari Agusalim

Universitas Trilogi

lestariagusalim@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh desentralisasi dalam mendistribusikan pendapatan nasional untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu PDB sebagai representasi pendapatan nasional dan data indeks gini sebagai representasi tingkat ketimpangan pendapatan dengan rentang waktu 1978-2015. Metode analisis menggunakan regresi linear dengan pendekatan OLS dimana Indeks gini digunakan sebagai variabel dependen, dan PDB sebagai variabel independen. Selain itu, terdapat variabel independen lainnya, yaitu variabel dummy desentralisasi yang berguna untuk mengetahui pengaruh desentralisasi terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari aspek ekonomi, desentralisasi belum mampu mendistribusikan pertumbuhan ekonomi untuk memperkecil ketimpangan pendapatan masyarakat.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Desentralisasi*

Abstract

This research aims to analyze the effect of decentralization on national income distribution and the reduce of income Inequality in Indonesia. This research used secondary data with gross domestic product (GDP) representing national income and gini index data representing income inequality from 1978 to 2015. An OLS Linear Regression approach was employed where the gini index was the dependent variable, and the independent variables were GDP and the Dummy for decentralization implementation. The result revealed that decentralization had not been able to distribute economic growth to minimize income Inequality.

Keywords: *Economic Growth, Income Inequality, Decentralization*

1. PENDAHULUAN

Sistem desentralisasi yang diterapkan sejak lahirnya era reformasi merupakan bentuk penolakan terhadap sistem sentralisasi yang telah gagal dalam berbagai aspek untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari aspek ekonomi, sistem sentralisasi berpegang teguh pada konsep pusat pertumbuhan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Francois Perroux penganut aliran ekonomi keseimbangan umum. Ia menyatakan bahwa teori pusat pertumbuhan didefinisikan sebagai suatu gugus industri yang mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan mempunyai kaitan yang kuat melalui hubungan input-output di sekitar *leading industry* (Setiadi 2009).

Pendukung teori ini percaya bahwa pemerintah di negara berkembang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan melakukan investasi yang besar pada industri padat modal di pusat kota. Teori pusat pertumbuhan juga ditopang oleh kepercayaan bahwa kekuatan pasar bebas melengkapi kondisi terjadinya *trickle down effect* dan menciptakan *spread effect* pertumbuhan ekonomi dari perkotaan ke pedesaan. Pandangan ini mengacu pada pandangan ekonomi neo-klasik dimana pembangunan dapat dimulai hanya dalam beberapa sektor yang dinamis, mampu memberikan rasio output yang tinggi dan pada wilayah tertentu, yang dapat memberikan dampak yang luas dan dampak ganda pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas. Kaum ekonomi neo-klasik berprinsip bahwa kekuatan pasar akan menjamin keseimbangan dalam distribusi spasial ekonomi dan proses *trickle down effect* dengan sendirinya akan terjadi ketika kesejahteraan di perkotaan tercapai dan dimulai dari level yang tinggi seperti kawasan perkotaan ke kawasan yang lebih rendah seperti kawasan *hinterland* dan perdesaan (Mercado, 2002).

Paradigma pusat pertumbuhan ekonomi dikritik oleh berbagai pihak karena dalam realitasnya *trickle down effect* tidak terwujud, yang terjadi malah sebaliknya, yaitu *trickle up effect*. Pembagian "kue kesejahteraan" bukan dari atas ke bawah, tetapi kekayaan daerah mengalir ke pusat. Ini adalah bentuk dari hasil praktek teori ekonomi neo-klasik yang melahirkan ketimpangan pendapatan.

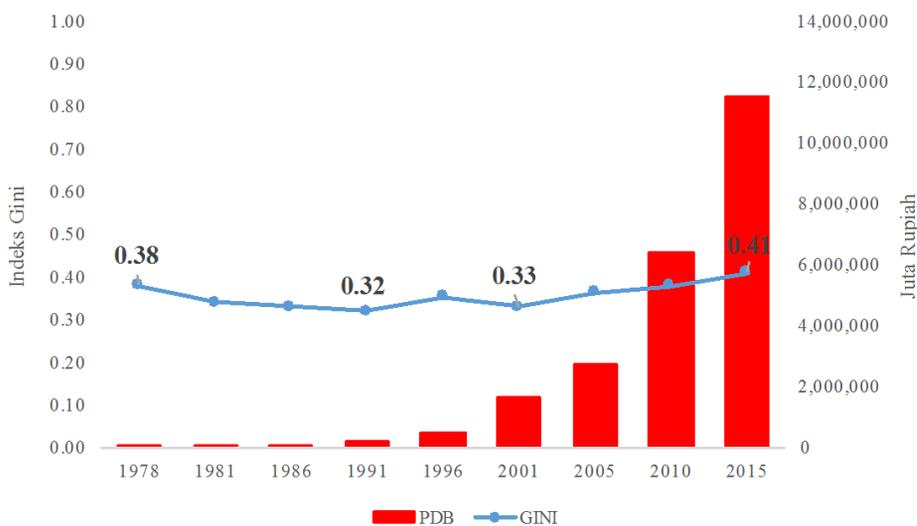
Myrdal berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi terpusat menghasilkan suatu proses sirkuler yang membuat pemilik modal mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tidak memiliki modal menjadi semakin miskin. Proses ini semakin memperlebar ketimpangan pembangunan di negara-negara terbelakang. Ketimpangan ini disebabkan oleh sistem ekonomi yang bermotif mengejar laba. Motif inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan berpusat di daerah yang memiliki potensi keuntungan yang besar, sementara daerah lain tetap terlantar. Hal ini disebabkan kekuatan pasar bebas, yang cenderung memperlebar dibandingkan mempersempit ketimpangan regional. Perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 1993).

Todaro dan Smith (2003) memberikan deskripsi serupa yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya memperbaiki distribusi keuntungan bagi segenap penduduk. Pertumbuhan yang cepat berakibat buruk kepada kaum miskin, karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern. Pemikir lain seperti Baudrillard (2011) juga mengkritik secara tajam ideologi pertumbuhan. Ia menyatakan bahwa ideologi pertumbuhan hanya menghasilkan dua hal, yaitu kemakmuran dan kemiskinan. Makmur bagi yang diuntungkan dan miskin bagi yang dipinggirkan.

Perdebatan mengenai pembangunan ekonomi tidak akan pernah berhenti. Setiap negara memiliki pandangan dan sikap tersendiri untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Banyak pihak berpendapat

bahwa keadilan dan kesejahteraan sosial pada masyarakat majemuk harus memperhatikan karakteristik daerah seperti perbedaan budaya, kepercayaan, kekayaan daerah dan lain sebagainya. Perbedaan ini mengharuskan pengaturan yang berbeda pula. Artinya, hal ini hanya mungkin terlaksana dalam pemerintahan desentralistik. Sistem ini bisa juga disebabkan oleh kesenjangan ekonomi, sosial, kesenjangan hak-hak antara kelompok mayoritas dan minoritas atau karena pemerintahan yang sentralistik tidak mampu memahami aspirasi daerah. Saat Indonesia menentukan sikap untuk berubah haluan dari sistem sentralistik menjadi sistem desentralisasi, maka diharapkan mampu memperbaiki distribusi pendapatan diantara warga negaranya dan hal-hal lain seperti yang diuraikan di atas. Sistem desentralisasi efektif dilaksanakan pada tahun 2001 walaupun undang-undang mengenai desentralisasi telah disahkan pada pertengahan tahun 1999.

Dalam rangka menyongsong dua dekade desentralisasi, perlu dilakukan evaluasi apakah sistem ini mengarah pada perwujudan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia atau tidak. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja yang positif tetapi ketimpangan pendapatan semakin melebar. Aspek pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pergerakan pendapatan domestik bruto (PDB), sementara itu ketimpangan pendapatan dengan melihat indeks gini. Indeks gini tercatat mengalami peningkatan dari 0.33 pada tahun 2001 naik menjadi 0.41 pada 2015. Kondisi ini semakin ironis, karena sebelum diberlakukannya desentralisasi indeks gini tidak pernah mencapai angka 0.41. Ini adalah tantangan berat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Perkembangan PDB dan indeks gini dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: BPS, 2016 (diolah)

Gambar 1.

Perbandingan PDB dan Indeks Gini Tahun 1978-2015

Dalam menyikapi pergerakan data pada Gambar 1, terdapat pandangan tradisional yang menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah syarat perlu bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan yang tinggi yang dimiliki oleh segelintir orang akan menaikkan tabungan dan meningkatkan investasi serta pertumbuhan ekonomi. Setelah itu barulah terjadi *trickle down effect* (Djojohadikusumo, 1994). Pandangan ini sebenarnya persis sama dengan pemikir teori pusat pertumbuhan.

Merujuk pada latar belakang, penulis ingin mengkaji lebih dalam apakah dengan diberlakukannya desentralisasi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan sehingga mampu mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Secara ringkas tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan diberlakukannya desentralisasi.
2. Memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1. Teori Solow-Swan

Model Solow-Swan menyatakan pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2007). Dalam model neo-klasik Solow-Swan dipergunakan suatu bentuk fungsi produksi yang lebih umum, yang bisa menampung berbagai kemungkinan substitusi antar modal dan tenaga kerja (Boediono, 1992). Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan suatu negara untuk meningkatkan kegiatan produksinya yang tidak hanya ditentukan oleh potensi negara yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar negara.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pendapatan masyarakat diperoleh melalui proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (Sukirno, 2006).

2.1.2. Teori Pertumbuhan Kuznet

Menurut Kuznets (1971) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Kuznet menyodorkan suatu hipotesis mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan ketimpangan distribusi pendapatan di antara penduduknya berbentuk U terbalik. Hal ini menyatakan bahwa pada awal pertumbuhan (yang diukur dengan produk nasional bruto per kapita), kesenjangan distribusi pendapatan (diukur dengan indeks Gini) semakin tinggi. Namun pada tahap tertentu, kesenjangan distribusi pendapatan akan menurun (Todaro, 2003).

2.2. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan di suatu negara pada kurun waktu tertentu. Kaitan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan ada beberapa pola, yaitu (Tarigan, 2002):

Tabel 1.

Kaitan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

| No. | Pendapatan | Ketimpangan Pendapatan |
|-----|------------|------------------------|
| 1 | Tinggi | Tinggi |
| 2 | Tinggi | Rendah |
| 3 | Rendah | Tinggi |
| 4 | Rendah | Rendah |
| 5 | Bervariasi | Tinggi |
| 6 | Bervariasi | Rendah |

Salah satu cara untuk menentukan tingkat ketimpangan pendapatan dengan menggunakan indeks gini. Cara ini memperhatikan seluruh lapisan penerima pendapatan. Nilai indeks gini terletak antara nol sampai dengan satu, dengan kategori:

- Bila indeks gini = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.
- Bila indeks gini = 1, artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.

Berdasarkan kategori di atas, tingkat ketimpangan pendapatan dibagi menjadi lima seperti yang terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2.

Tingkat Ketimpangan Pendapatan Indeks Gini

| Indeks Gini | Keterangan |
|-------------|-----------------------------|
| ≥ 0.80 | : ketimpangan sangat tinggi |
| 0.60-0.79 | : ketimpangan tinggi |
| 0.40-59 | : ketimpangan sedang |
| 0.20-0.39 | : ketimpangan rendah |
| <0.20 | : ketimpangan sangat rendah |

2.3. Desentralisasi

Desentralisasi adalah restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah sistem tanggung jawab bersama antara institusi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah menurut prinsip subsidiaritas, sehingga bisa meningkatkan keseluruhan kualitas dan keefektifan sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah. Dengan desentralisasi, diharapkan mampu memberikan peluang bagi terciptanya pemerintahan yang baik, seperti meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan berbagai keputusan politik; membantu kapasitas rakyat yang masih dalam taraf berkembang, dan memperluas tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas Desentralisasi mensyaratkan adanya reformasi dalam hubungan pusat dan daerah disertai otonomi pemerintahan daerah. Ketika pemerintah daerah dan masyarakat lokal mencapai tingkatan otonomi, keduanya dapat memberdayakan sumberdaya lokal demi mencapai taraf pembangunan ekonomi yang tinggi di daerahnya masing-masing (UNDP, 1997).

Ide tentang desentralisasi berangkat dari suatu antithesis terhadap sentralisasi. Sistem sentralisasi dianggap selalu melakukan unifikasi kekuasaan politik dan ekonomi pada tangan pemerintah pusat, maka sebaliknya desentralisasi mengajukan gagasan tentang pembagian kekuasaan politik, ekonomi, dan wewenang administrasi antara pemerintah pusat dan daerah (Hidayat, 2005). Menurut Allen, munculnya wacana desentralisasi bukan semata dihubungkan dengan tidak berhasilnya perencanaan terpusat tetapi juga adanya kesadaran

bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Oleh sebab itu, para pendukung desentralisasi menyodorkan berbagai argumen rasional tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi (Kuncoro, 2004).

Smith menyebutkan sedikitnya ada tiga alasan utama untuk mengaplikasikan desentralisasi, yaitu; untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, untuk memperluas otonomi daerah, dan pada beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik (Hidayat, 2005). Hirawan (2007) menyampaikan hal serupa, bahwa otonomi daerah adalah landasan tujuan demokratisasi dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan desentralisasi bertujuan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang demokratis dan memberikan pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan diharapkan membangun perekonomian dengan tujuan akhirnya mensejahterakan masyarakat.

Di Indonesia, desentralisasi mulai diterapkan sejak memasuki era reformasi, dengan menerbitkan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan sekaligus menjadi awal era baru desentralisasi fiskal di Indonesia yang mulai efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Proses pelaksanaannya mengalami penyempurnaan terhadap kedua UU yang telah ada. Pada tahun 2004, UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD) diganti dengan UU No. 33 tahun 2004.

2.4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan

Kuznetz (1971) menemukan hubungan antara tingkat pendapatan dan distribusi pendapatan berbentuk U terbalik. Menurutnya pada awal proses pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan meningkat karena proses urbanisasi dan industrialisasi, pada akhir proses pembangunan, ketimpangan pendapatan mengalami penurunan, yaitu pada saat sektor-sektor ekonomi di daerah perkotaan sudah mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja yang berasal dari pedesaan.

Terdapat beberapa studi empiris yang mencoba menguji hipotesis Kuznetz, dengan menggunakan data makro dari sejumlah negara. Sebagian besar studi-studi tersebut mendukung hipotesis Kuznets, sedangkan sebagian lainnya menolak. Hasil penelitian Deininger dan Squire (1996) tidak menunjukkan adanya suatu relasi yang jelas antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Walaupun hipotesis itu diterima, tetapi sebagian besar membuktikan bahwa hubungan negatif antara pertumbuhan dan ketimpangan dalam jangka panjang hanya terjadi pada kelompok negara-negara industri maju.

Studi lain dengan pendekatan analisis deret waktu, misalnya oleh Ravallion dan Datt (1996) yang menemukan bahwa di India selama periode 1950-1990 pendapatan rata-rata per kapita meningkat di sisi lain ketimpangan pendapatan mengalami penurunan. Berikutnya, hasil penelitian Wahyuni (2004) menemukan adanya hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka ketimpangan pendapatan mengalami penurunan. Selanjutnya, Waluyo (2004) meneliti hubungan antara tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Kesimpulan penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan negatif dan signifikan antara distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi.

2.5. Hubungan Desentralisasi dengan Ketimpangan Pendapatan

Menurut Amir (2012) tujuan pokok kebijakan desentralisasi adalah untuk; (1) menghilangkan kesenjangan yang ada, baik kesenjangan vertikal maupun kesenjangan horizontal, (2) menciptakan demokratisasi di Indonesia, sehingga kekuasaan tidak terpusat di suatu tempat, (3) meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, dan (4) menciptakan efek penyebaran antardaerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi diharapkan ketimpangan pendapatan semakin sempit. Menurut penelitian Akai dan Sakata (2005) desentralisasi fiskal dapat menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan mengurangi kesenjangan antardaerah. Mereka menjelaskan sistem otonomi akan mampu menurunkan ketimpangan pendapatan lebih besar dibanding sistem sentralistik, apabila pemerintah daerah lebih intensif memajukan daerahnya. Pemerintah daerah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Namun demikian beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat hubungan yang samar antara desentralisasi dengan ketimpangan pendapatan. Nurana dan Muta'ali (2010) menemukan terjadi fluktuasi tingkat ketimpangan perkembangan wilayah selama 1995-2009 di kawasan Ciayumajakuning. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan otonomi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan perkembangan wilayah.

Bonet (2006) menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan regional di Kolombia. Penelitian ini membuktikan bahwa setelah diberlakukannya desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan di setiap daerah tetapi diikuti oleh semakin tingginya disparitas pendapatan antar wilayah selama periode penelitian. Sebabnya karena; (1) alokasi sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah lebih besar untuk pengeluaran rutin dibanding pengeluaran investasi. (2) lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, (3) kurangnya insentif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan (4) kurangnya redistribusi transfer nasional.

Penelitian lain terkait dengan desentralisasi dilakukan juga oleh Tiebout (1956) yang menemukan hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan wilayah melalui sifat mobilitas wajib pajak. Masyarakat (wajib pajak) dapat secara bebas memilih wilayah mana yang akan ditempati dengan mempertimbangkan selera dan besarnya pengenaan pajak di daerah tersebut. Wilayah yang memiliki fasilitas dan pelayanan publik yang berkualitas tinggi akan lebih dipilih dibandingkan dengan wilayah yang pelayanan publiknya kurang memadai.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan berbagai literatur dari internet serta publikasi ilmiah yang dapat menunjang penelitian ini. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan data yang digunakan adalah data *time series*. Data yang dibutuhkan adalah; (1) PDB ADHB tahun 1978-2015 dan (2) Indeks Gini tahun 1978-2015.

3.2. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data digunakan metode dokumentasi, yaitu suatu cara memperoleh data atau informasi dengan jalan melihat kembali laporan tertulis baik berupa angka maupun keterangan (Arikunto, 2012). Pengolahan data dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* EViews 8, Microsoft Office Excel 2016.

3.3. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif adalah metode analisis dengan cara mendeskripsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud. Sementara itu, analisis kuantitatif bersifat hitungan dengan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dalam bentuk angka dengan menggunakan model ekonometrika untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel-variabel independen (PDB dan variabel *dummy*) terhadap variabel dependen (Indeks Gini).

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Variabel PDB berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel indeks gini.
2. Variabel *dummy* berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel indeks gini.

Hipotesis tersebut akan diuji melalui suatu model ekonometrika. Hipotesis yang dibuktikan bahwa produk domestik bruto (PDB) mempunyai korelasi yang signifikan terhadap indeks gini. Setelah terbentuk model ekonometrika, model ini akan digunakan untuk menguji desentralisasi mempunyai korelasi positif terhadap indeks gini. Perbandingan koefisien variabel *dummy* dan perkalian antara PDB dengan *dummy* variabel (PDB**Dummy*) untuk mengetahui perubahan dengan atau tanpa desentralisasi yang dilakukan setiap kenaikan dari nilai PDB terhadap indeks gini. Untuk mengetahui apakah variabel tersebut berpengaruh atau tidak terhadap indeks gini dapat diketahui dari nilai *t statistic* dan nilai *probability*. Pengaruh dari desentralisasi terhadap indeks gini dapat dilihat dari tanda koefisien *dummy* dan koefisien PDB**Dummy* apakah positif atau negatif, sehingga dapat dibuktikan bahwa dengan adanya desentralisasi terjadi peningkatan atau penurunan indeks gini dari setiap kenaikan PDB.

Teknik analisis data dengan estimasi persamaan linier dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (*least square method*). Penggunaan metode ini mengharuskan memenuhi asumsi-asumsi sebagai berikut (Arikunto., 2012);

1. Model regresi merupakan linier dalam parameter.
2. *Error term* (m) memiliki distribusi normal, variabel dependen dan distribusi sampling koefisien regresi memiliki distribusi normal. Maka nilai harapan dan rata-rata kesalahan nol.
3. Varians tetap atau bersifat *homoscedasticity*.
4. Hubungan antara variabel bebas dengan *error term* tidak ada.
5. Korelasi serial atau autokorelasi di *error term* tidak ada.
6. Hubungan antarvariabel bebas tidak terjadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, model regresi linier berganda yang digunakan sebagai berikut:

$$GINI = \beta_0 + \beta_1 PDB + \beta_2 D + \beta_3 D^* PDB + \mu$$

Model persamaan regresi berganda di atas dimodifikasi dimana variabel independennya (PDB) diubah menjadi persamaan logaritma natural. Hal ini bertujuan agar memudahkan interpretasi hasil pengolahan data. Bentuk logaritma natural digunakan karena pada umumnya nilai variabel sangat besar dan satuan variabel satu dengan lainnya berbeda. Setelah mengalami perubahan, Maka model persamaannya yang di atas diubah berikut ini:

$$LNGINI = \beta_0 + \beta_1 LNPDB + \beta_2 D + \beta_3 D^* LNPDB + \mu$$

Keterangan :

GINI = Indeks Gini

- LNGINI = Bentuk Logaritma Indeks Gini
- PDB = Pendapatan Domestik Bruto
- LNPDB = Bentuk logaritma narural dari Pendapatan Domestik Bruto
- D = Variabel Dummy (D=0 sebelum desentralisasi, D=1 sesudah desentralisasi)
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Parameter estimasi
- m = Error term

Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil mengharuskan model regresi yang menghasilkan estimator linear yang tidak bias yang terbaik (*Best Linear Unbias Estimator/BLUE*). Oleh karena itu, harus dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model yang digunakan bersifat robust. Selain itu, untuk melihat signifikansi dari model penelitian digunakan pengujian statistik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Stasioneritas Data

Data runtun waktu seringkali tidak stationer sehingga menyebabkan hasil regresi meragukan atau disebut regresi lancung. Suatu data dikatakan stasioner jika memenuhi tiga kriteria yaitu jika rata-rata dan variannya konstan sepanjang waktu dan kovarian antara dua data runtut hanya tergantung dari kelambanan antara dua periode waktu. Ada beberapa metode uji stasioner, dalam penelitian ini akan menggunakan uji akar-akar unit (*unit root test*) dan dikenal dengan uji akar unit Dickey-Fuller (DF). Prosedur untuk menentukan data stasioner dengan cara membandingkan antara nilai statistik DF dengan nilai kritisnya. Jika nilai absolut ADF lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan stationer dan jika sebaliknya nilai absolut statistik ADF lebih kecil dari nilai kritisnya maka data tidak stationer.

Data stasioner apabila nilai Augmented Dickey-Fuller test statistic (ADF) lebih besar dari nilai kritis pada level 1%, dapat dilihat pada Tabel 3. Terlihat variabel penelitian stasioner pada *1st differnce*. Selanjutnya data yang telah stasioner inilah yang digunakan di dalam model.

Tabel 3.
Hasil Uji Stasioneritas Augmented Dickey Fuller

| No. | Variabel | Tingkat Stasioneritas | | | | | |
|-----|----------|-----------------------|-------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------|
| | | Level | | | 1 st Difference | | |
| | | t-statistic | Probability | Keterangan | t-statistic | Probability | Keterangan |
| 1 | LNGINI | -1.1241 | 0.6959 | tidak stasioner | -5.5622 | 0.0000 | stasioner |
| 2 | LNPDB | -1.8570 | 0.3482 | tidak stasioner | -5.3268 | 0.0001 | stasioner |
| 3 | D | -0.7758 | 0.8142 | tidak stasioner | -6.0000 | 0.0000 | stasioner |
| 4 | DLNPDB | -0.6024 | 0.8580 | tidak stasioner | -5.9990 | 0.0000 | stasioner |

Keterangan: Semua signifikan dalam level 1%

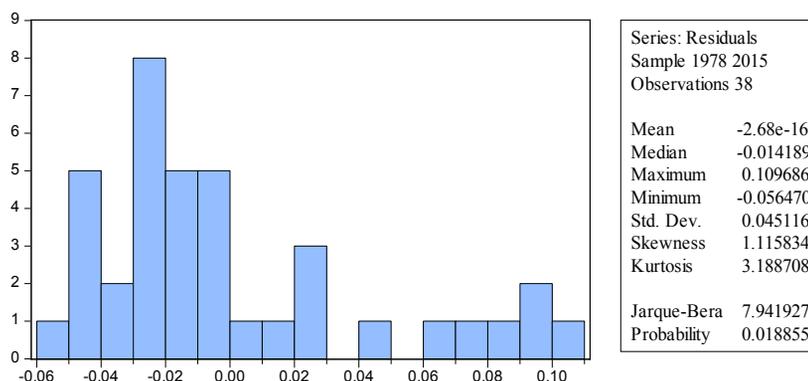
4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas

Untuk mendeteksi apakah residualnya berdistribusi normal atau tidak dengan membandingkan nilai Jarque Bera (JB) dengan χ^2 tabel, yaitu:

- Jika nilai JB > χ^2 tabel, maka residualnya berdistribusi tidak normal.
- Jika nilai JB < χ^2 tabel, maka residualnya berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik menggunakan EViews 8, diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 7.9419 dengan probabilitas sebesar 0,0188. Sementara itu nilai χ^2 tabel sebesar 7.8147 dengan probabilitas 0.05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.



Gambar 2.
Hasil Uji Normalitas

4.2.2. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dilakukan melalui uji Durbin Watson (DW). Syarat tidak terjadi gejala autokorelasi adalah apabila nilai DW lebih besar atau sama dengan nilai du dan lebih kecil dari nilai $4-du$. Atau dengan kata lain syarat tidak terjadi autokorelasi adalah nilai DW berada diantara $du \leq DW \leq 4-du$.

Dengan $n = 38$ dan jumlah variabel bebas = 3, diperoleh nilai $dl = 1,3177$ dan nilai $du = 1,6563$. Nilai DW hitung adalah sebesar 1,9744 berarti DW lebih besar dari nilai du , dan lebih kecil dari $4-du$ yaitu 2,3437. Nilai DW ini terletak diantara du dan $(4-du)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini tidak terjadi autokorelasi.

4.2.3. Uji Multikolinieritas

Pengujian terhadap gejala multikolinieritas hanya dilakukan ketika jumlah variabel independen dalam penelitian berjumlah lebih dari 1. Apabila kita menggunakan analisis regresi linier berganda yang memiliki variabel dummy seperti dalam penelitian ini, maka uji asumsi multikolinieritas tidak perlu dilakukan, karena pada dasarnya uji multikolinieritas ini adalah menguji ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen. Jadi apabila kita hanya menggunakan 1 variabel independen dan variabel dummy maka uji multikolinieritas ini tidak perlu dilakukan.

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan kondisi dimana varian (σ^2) dari faktor pengganggu atau *error term* tidak sama untuk semua observasi atau pengamatan atas variabel bebas. Untuk melihat apakah terdapat heteroskedastisitas dalam model akan digunakan *white test*. Adapun kaidah keputusannya adalah sebagai berikut:

- H_0 = residual bersifat homoskedastisitas
- H_1 = residual bersifat heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil analisis residual menggunakan EViews 8, diperoleh *white test* sebesar 4.8421 dengan probabilitas 0,1837. Dengan demikian nilai probabilitas *white test* lebih besar dari nilai Alpha 0.05, sehingga kita

tidak dapat menolak H_0 dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model. Secara jelas hasil pengujian heterokedastisitas tersaji dalam Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Heteroskedasticity Test: White | | | |
|--------------------------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 1.655049 | Prob. F(3,34) | 0.1950 |
| Obs*R-squared | 4.842162 | Prob. Chi-Square(3) | 0.1837 |
| Scaled explained SS | 4.242168 | Prob. Chi-Square(3) | 0.2365 |

4.3. Analisis Hasil Regresi

Berdasarkan hasil analisis menggunakan EViews 8 diperoleh hasil regresi seperti yang tertera pada Tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Regresi

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| LNPDB | -0.026596 | 0.008758 | -3.036920 | 0.0046 |
| D (<i>dummy</i>) | -2.469718 | 0.307879 | -8.021717 | 0.0000 |
| DLNPDB | 0.172915 | 0.020777 | 8.322495 | 0.0000 |
| C | -0.779085 | 0.106409 | -7.321625 | 0.0000 |
| R-squared | 0.756334 | Mean dependent var | | -1.063868 |
| Adjusted R-squared | 0.734834 | S.D. dependent var | | 0.091398 |
| S.E. of regression | 0.047065 | Akaike info criterion | | -3.175288 |
| Sum squared resid | 0.075313 | Schwarz criterion | | -3.002910 |
| Log likelihood | 64.33047 | Hannan-Quinn criter. | | -3.113957 |
| F-statistic | 35.17834 | Durbin-Watson stat | | 1.974474 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

Dependent Variable: LNGINI

Sebelum menjelaskan pengaruh desentralisasi dalam mendistribusikan pendapatan nasional untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia, perlu dilakukan uji statistik seperti uji koefisien determinasi, uji F dan uji t.

Berdasarkan hasil pengolahan data didapat nilai R^2 sebesar 0.7563, seperti yang terlihat pada Tabel 5. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang dipilih pada variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan keragaman variabel dependen dengan kontribusi sebesar 75,63 persen, sedangkan sisanya sebesar 24,37 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan pada penelitian ini.

Selanjutnya dilakukan uji F untuk mengetahui secara keseluruhan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F_{hitung} dengan tingkat signifikansi 5% atau 0.05. Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai probabilitas F_{hitung} ($F_{statistic}$) ternyata lebih

kecil dari 0.05. Artinya, secara keseluruhan variabel independen, secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Terakhir dilakukan uji t untuk menentukan apakah variabel-variabel independen dalam persamaan regresi secara individu signifikan dalam memprediksi nilai variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas t_{hitung} terhadap tingkat signifikansi α (5% atau 0,05), dengan kriteria pengujian jika probabilitas $t_{\text{hitung}} > \alpha$ (0,05) maka pengaruh variabel independen itu tidak signifikan, sehingga H_0 diterima, yang artinya variabel independen tidak mempengaruhi secara individual variabel dependennya, sebaliknya jika probabilitas $t_{\text{hitung}} < \alpha$ (0,05) maka pengaruhnya signifikan, sehingga H_1 diterima, yang artinya variabel independen dapat mempengaruhi secara individual variabel dependennya. Dari hasil output regresi yang dirangkum pada Tabel 5. dapat dilihat bahwa probabilitas t_{hitung} berturut-turut untuk variabel LNPDB, variabel D (*dummy*), dan variabel DLNPDB adalah sebesar 0.0046, 0.0000 dan 0.0000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel LNPDB, D (*dummy*), dan DLNPDB secara individual signifikan atau berpengaruh terhadap variabel LNGINI.

Penjelasan Hasil Regresi

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, model menghasilkan estimator linear yang tidak bias yang terbaik. Setelah diketahui tidak adanya gangguan asumsi klasik, selanjutnya dapat disimpulkan signifikansi hasilnya menggunakan uji F dan uji t. Besaran koefisien dan interpretasi hasil regresi, adalah sebagai berikut:

a. Variabel LNPDB sebesar -0.0265

Setiap kenaikan PDB sebesar satu persen maka akan menurunkan indeks gini sebesar 0.0265 persen. Bila diasumsikan pada tahun 2016 terjadi kenaikan PDB sebesar 5.3 persen (asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2016) maka akan menurunkan indeks gini sebesar 0.1409 persen. Artinya, bila pada tahun 2015 indeks gini sebesar 0.41 maka dengan asumsi pertumbuhan tahun 2016 sebesar 5.3 persen, maka indeks gini turun menjadi 0.409. Hasil ini menunjukkan bahwa tanpa melihat ada atau tidaknya desentralisasi setiap kenaikan pendapatan nasional akan mengurangi ketimpangan pendapatan.

b. Variabel Dummy sebesar -2.4697

Dengar diberlakukannya desentralisasi secara efektif sejak tahun 2001 mengakibatkan indeks gini menurun sebesar -2.4697 persen dengan asumsi variabel lainnya tetap.

c. Variabel DLNPDB sebesar 0.1729

Setelah diterapkannya desentralisasi sejak tahun 2001 mengakibatkan setiap kenaikan satu persen dalam PDB maka akan meningkatkan indeks gini sebesar 0.1464 persen (-0.0265 + 0.1729). Artinya, setelah desentralisasi dilaksanakan, setiap peningkatan satu persen PDB akan meningkatkan indeks gini sebesar 0.1464 persen. Bila diasumsikan pada tahun 2016 terjadi kenaikan PDB sebesar 5.3 persen (asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2016) maka akan meningkatkan indeks gini sebesar 0.1464 persen. Artinya, bila pada tahun 2015 indeks gini sebesar 0.41 maka dengan asumsi pertumbuhan tahun 2016 sebesar 5.3 persen, maka indeks gini naik menjadi 0.413. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya desentralisasi maka setiap kenaikan pendapatan nasional akan mengurangi ketimpangan pendapatan.

d. Konstanta sebesar 0.7790

Apabila PDB tidak mengalami perubahan, indeks gini akan meningkat sebesar 0.7790 persen.

Dengan demikian persamaan hasil regresi di atas dapat ditulis dengan persamaan logaritma sebagai berikut:

Sebelum Desentralisasi

$$\text{LNGINI} = 0.7790 - 0.0265\text{LNPDB}$$

Setelah Desentralisasi

$$\text{LNGINI} = 0.7790 - 2.4697D + (-0.0265 + 1729)\text{LNPDB} \text{ atau}$$

$$\text{LNGINI} = -1.6907 + 0.1464\text{LNPDB}$$

Berdasarkan persamaan di atas, dapat dilihat bahwa dengan diberlakukannya desentralisasi malah meningkatkan indeks gini sebesar 0.1199 persen. Hasil analisis ini memberikan informasi berharga bahwa dengan diberlakukannya desentralisasi belum mampu menurunkan ketimpangan pendapatan. Hal ini didukung oleh informasi yang diterima dari BPS sebagaimana yang terlihat pada Tabel 6 yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di pulau-pulau besar di Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan. Tahun 2000 merupakan warisan distribusi pendapatan pada era pemerintahan menganut sistem sentralisasi. Sejak diberlakukannya desentralisasi secara efektif pada tahun 2001 hingga tahun 2014 ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan di pulau-pulau besar Indonesia.

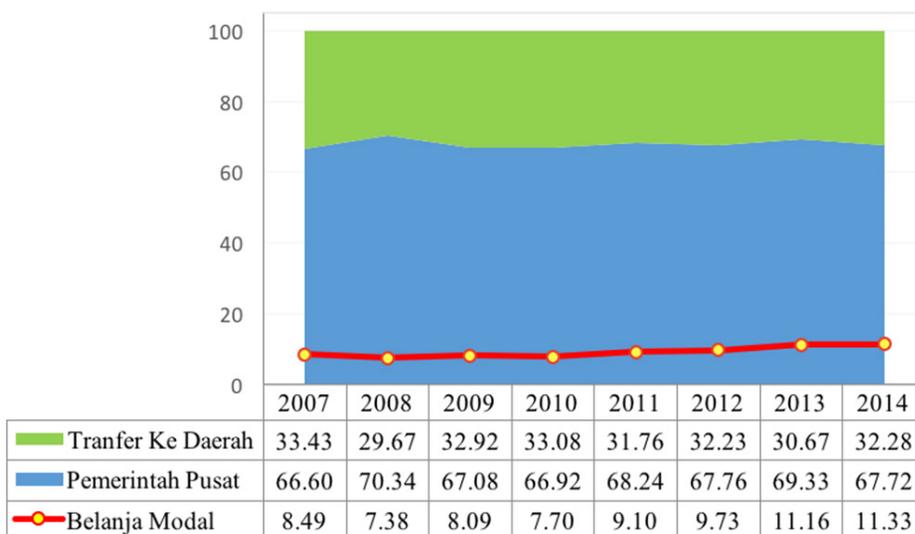
Tabel 6.

Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku (persen)

| Pulau | 2000 | 2014 |
|---------------|-------------|-------------|
| Sumatera | 22.51 | 23.17 |
| Jawa | 59.43 | 57.41 |
| Kalimantan | 9.13 | 8.71 |
| Nusa Tenggara | 2.81 | 2.87 |
| Sulawesi | 4.24 | 5.63 |
| Maluku | 0.32 | 0.52 |
| Papua | 1.57 | 1.69 |
| Total | 100 | 100 |

Sumber: BPS (diolah)

Pada Gambar 3, dapat dilihat dengan jelas bagaimana alokasi pengeluaran negara, dimana anggaran untuk pengeluaran pemerintah pusat rata-rata sebesar 68 persen, sedangkan sisanya digunakan untuk transfer ke daerah yaitu sebesar 32 persen. Pembagian anggaran tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan fiskal vertikal. Alokasi dana yang ditransfer ke daerah tersebut kemudian harus dibagi dengan seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Tentu anggaran tersebut belum cukup untuk melakukan pembangunan di daerah. Selain itu, dari keseluruhan pengeluaran pemerintah, hanya sebesar 9.12 persen digunakan untuk belanja modal. Dengan struktur anggaran seperti ini tentu sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, dan menyelesaikan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah.



Sumber: BPS 2015 (diolah)

Gambar 3.

Realisasi Pengeluaran Negara 2007-2014

Selain itu, aspek lain yang mengemuka adalah soal perimbangan keuangan, dimana semangat dari konsep UU No. 33/2004 menjamin berlakunya pembangunan secara adil dan berkelanjutan antar daerah. Di sini muncul masalah berkenaan dengan alokasi yang cenderung tidak adil sesuai dengan amanat UU diatas. Sekedar contoh, kabupaten maju yang memiliki indeks fiskal tinggi dan indeks kemiskinan rendah justru mendapatkan dana transfer tinggi, rata-rata sebesar Rp 716 miliar (2010). Sebaliknya, yang tergolong tertinggal (183 kabupaten) yang mempunyai indeks fiskal rendah dan indeks kemiskinan tinggi malah memperoleh alokasi yang rendah, rata-rata sebesar Rp 486 miliar (2010). Jika konsep yang berlaku sekarang terus dipertahankan, maka akan sulit bagi daerah tertinggal mengejar daerah maju dalam pembangunan, sehingga konsep dana transfer ke depan perlu penyempurnaan (Ismail, *et al.*, 2014).

Masalah lainnya, pengeluaran paling besar untuk pemerintah daerah adalah untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang menyerap sebanyak 32 persen dari seluruh pengeluaran pemerintah daerah. Ditambah lagi, lebih dari setengah kenaikan alokasi DAU yang seharusnya digunakan untuk peningkatan penyediaan layanan kepada masyarakat digunakan untuk membiayai belanja pegawai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota (World Bank, 2007). Selain persoalan fiskal, sejak penerapan otonomi daerah, sekitar 70 persen dari total kepala dan wakil kepala daerah diseret ke meja hijau. Anehnya, data statistik itu tidak menggentarkan pejabat-pejabat lain (KPK, 2016).

Penelitian ini menunjukkan desentralisasi tidak serta merta dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia, bahkan setelah berjalan hampir dua dekade. Terdapat banyak persoalan multidimesi yang harus diselesaikan untuk menunjang agar ketimpangan pendapatan dapat diturunkan. Beberapa pemikir ekonomi yang mengkritik teori ekonomi pertumbuhan. Tidak peduli suatu negara menganut sistem sentralisasi atau desentralisasi, pertumbuhan ekonomi tetap akan menciptakan ketimpangan pendapatan seperti yang dikemukakan oleh Baudrillard (2011), bahwa pertumbuhan ekonomi adalah fungsi kemakmuran dan kemiskinan, dimana yang makmur semakin makmur dan yang miskin semakin miskin. Di era desentralisasi proses *trickle up effect* tetap saja terjadi, dimana kekayaan daerah terus mengalir ke atas/pusat.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Merujuk pada latar belakang, tujuan, dan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya; (1) pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap indeks gini sebelum diterapkan desentralisasi fiskal. Setiap kenaikan satu persen PDB akan menurunkan indeks gini sebesar 0.0265 persen, (2) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks gini setelah diberlakukannya desentralisasi. Setiap kenaikan satu persen dalam PDB meningkatkan indeks gini sebesar 0.1199 persen. Artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan sejak desentralisasi diterapkan, dan (3) Ketimpangan pendapatan oleh banyak faktor seperti masih kurang adilnya alokasi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah, pengeluaran untuk belanja modal masih sangat rendah, banyaknya kepala daerah yang terjerat masalah hukum.

5.2. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka ke depan konsep APBN perlu memperhatikan poin-poin berikut. Pertama, alokasi belanja harus diperbaiki dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada anggaran pembangunan/belanja modal. Penghematan yang paling mungkin dilakukan diambil dari pos belanja barang dan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, sambil mengurangi praktik korupsi yang terjadi selama ini. Kedua, dana perimbangan seharusnya mempertimbangkan aspek keadilan, yakni daerah yang indeks fiskalnya rendah dan indeks kemiskinannya tinggi seharusnya mendapatkan alokasi dana yang lebih besar. Ketika, dana transfer dimasa depan harusnya juga ditingkatkan, minimal 50 persen dari APBN agar daerah lebih punya ruang dalam membangun wilayahnya. Keempat, penerapan secara utuh sistem pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai N, Sakata, M. 2005. Fiscal Decentralization, Comittment and Regional Inequality: Evience from State-Level Cross-sectional Data for the United States. CIRJE-F-315. (<http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2005/2005cf315.pdf>, diakses tanggal 5 Februari 2016).
- Amir H. 2012. Ketimpangan Antar-Wilayah Melebar atau Merapat?. *Warta Fiskal*, V, hal 16-19. (http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/2010/kliping/wartafiskal/edisi_5_2012/files/edisi-5.pdf, diakses pada 05 Februari 2016).
- Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Bina Aksara. Jakarta
- Baudrillard JP. 2011. *Masyarakat Konsumsi*. Bantul. Penerbit:Kreasi Wacana.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu ekonomi. Edisi 1. Cetakan Ke 5. Jogyakarta. BPFE.
- Bonet, Jaime. 2006. *Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: evidence from the Colombian experience*. original version.
- Deiningner K dan Squire L. 1996. *Measuring Inequality: A New Data Base (Online)*. World Bank. (<http://www.cid.harvard.edu/hiid/537.pdf>, diakses tanggal 5 Februari 2016)
- Djoyohadikusumo, S. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Cetakan pertama. Jakarta.Penerbit PT. Pustaka LP3ES.
- Hidayat, S. 2005. *Otonomi Daerah, Pilkada dan Komitmen Desentralisasi Politik: Tinjauan atas tiga UU mengenai Otonomi Daerah dalam Pilkada Langsung, Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*. Partnership dan Pusat Kajian Ilmu Politik Fisip UI. Jakarta.

- Hirawan, S.B. 2007. Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia. Jakarta: UI.
- Jhingan M.L. 1993. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta Raja Grafindo Perkasa.
- Ismail, M., Santoso,D.B., dan Yustika, A.E., 2014. Sistem Ekonomi Indonesia: tafsiran Pancasila dan UUD 1945. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Kuncoro M, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta. Erlangga.
- Kuznets S. 1971. Economics Growth of Nations. Cambridge: Harvard University Press.
- Mankiw NG. 2007. Makroekonomi: Edisi 6. Pent. Fitria Liza dan Imam Nurmawan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mercado, R.G. 2002. Regional Development in the Philippine: A Review of Experience, State of the Art and Agenda for Research and Action. Discussion Paper Series. Philippine Institute for Development Studies.
- Ravallion M dan Datt G. 1996. How important to India's poor is the sectoral composition of economic growth? World Bank Economic Review 10 (1), 1-25.
- Sukirno S. 2006. Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan. Cetakan Ketiga. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Setiadi H. 2009. Konsep Pusat-Pinggiran: Sebuah Tinjauan Teoritis. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Indonesia. Working Paper No. KKI-01/KBP-PW/2009.
- Taringin, R. 2002. *Rencana Pembangunan Wilayah*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Medan.
- Tiebout C. 1956. "A Pure Theory of Local Expenditures", Journal of Political Economy, 64, pp.416-424 .
- Todaro MP dan SC Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid 1. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Todaro MP. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs. Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- UNDP. 1997. *Reconceptualising Governance: Discussion paper No.2. The Principles of Good Governance*.
- Wahyuni H. 2004. Is There A Link Between Increased Growth And Reduced Income Inequality? Analysis Of Cross-Country Studies. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol 1, No.1, Februari, hal 1-9.
- Waluyo J. 2004. Hubungan antara tingkat kesenjangan Pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi: Suatu studi lintas negara". Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 9 No. 1, Juni, hal: 1-20.
- World Bank. 2007. Kajian Pengeluaran Publik: Memaksimalkan Peluang Baru. Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007. Jakarta.